

RELASI PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN WAJO



BESSE SRI RATIH

E041201056



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
KULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

RELASI PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN WAJO

BESSE SRI RATIH

E041201056



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
KULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KOTA MAKASSAR

2024

RELASI PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN WAJO

BESSE SRI RATIH

E041201056



Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

Pada

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

KULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KOTA MAKASSAR

2024



SKRIPSI

RELASI PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN WAJO

BESSE SRI RATIH
E041201056


telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Pada tanggal, bulan, tahun
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pada 3 Juni 2024

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Kota Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Andi Naharuddin, S.IP., M.Si
NIP. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,
Ketia Program Studi

Di Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

RELASI PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN WAJO

Disusun dan Diajukan Oleh:

BESSE SRI RATIH

E041201056

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 3 Juni 2024

Menyetujui.

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.

Anggota I : Haryanto, S.IP., M.Si.

Anggota II : Endang Sari, S.IP., M.Si.

(.....)
[Handwritten Signature]
(.....)
[Handwritten Signature]
(.....)
[Handwritten Signature]



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul Relasi Partai Politik Dan Pesantren Dikabupaten Wajo adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.SI selaku pembimbing utama dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 3 Juni 2024



Besse Sri Ratih
NIM E041201056



UCAPAN TERIMA KASIH

سَمِعَ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.SI selaku pembimbing utama dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan fasilitas dan kenyamanan yang layak selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Kepada kedua orang tua peneliti, H. Kandacong, S.H, M.Si., M.H dan Hj. Andi Suriati, AR. untuk beliau berdua lah skripsi ini peneliti persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing peneliti selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua. Kepada Saudara dan Saudari penulis H. Kasmanto Saputra, S.H, Hj. Besse, Astitien, S.A.P, Besse Astiara, dan Kepada Ipar Penulis Fadli Amar Ma'ruf, S.A.P dan Faaizah Nur Asmariyah, S.K.M, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih berikutnya saya persembahkan kepada lembaga Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas bagi peneliti yang sangat layak dan nyaman untuk menuntun ilmu selama bertahun-tahun.

Ucapan terima kasih berikutnya saya persembahkan kepada lembaga FISIP Universitas Hasanuddin, Dekan Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri yang telah menyediakan fasilitas bagi peneliti yang sangat layak dan nyaman untuk menuntun ilmu selama bertahun-tahun.

Ucapan dan doa saya kirimkan kepada (Alm). Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

dan Bapak Dr. Ghani Nadir, S.IP., M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program



Dr. Gustiana, A. Kambo, S.IP., M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., MA.

P., M.Si. Selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan

saran yang membangun dengan penyampaian yang sederhana pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.

Ucapan terima kasih kepada Seluruh dosen departemen Ilmu Politik yang telah membagikan ilmu yang berharga kepada peneliti selama peneliti mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin selama hampir empat tahun. Seluruh ilmu tersebut akan peneliti terus kembangkan dan bagikan kepada orang lain.

Ucapan terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh staff departemen Ilmu Politik yang telah membantu peneliti dalam hal pengurusan berkas terkait kegiatan – kegiatan yang peneliti ikuti dan seluruh berkas persiapan ujian dan penyelesaian skripsi ini.

Kepada Sahabat – sahabat seperjuangan peneliti yang selalu siap mendengarkan apapun curhatan dan keluh-kesah peneliti serta bersedia memberikan banyak masukan mengenai skripsi hingga kehidupan peneliti yang sangat bermakna. Terima kasih selalu memberikan dorongan dan masukan positif dan telah menjadi tempat bercerita dan mengadu Peneliti mengenai banyak hal.

Teman-teman seperjuangan KKN Gel.110 BPJS Desa Arasoe Kabupaten Bone; Muh. Arif Zul Adhi, Besse Sri Ratih, Amirullah, Muh. Fadhil Akbar, Andi Whia yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi ini,

Kepada sahabat – sahabat penulis sejak hari pertama perkuliahan, Regina, Fira, Luthfi, Abe, Fiona, Aura, Pangeran, Rey, Ochang, Dilla. Terima kasih telah memberikan warna yang beragam terhadap kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di kampus, kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha dan berjuang agar kita dapat meraih kesuksesan bersama.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan



...ut dibanggakan untuk diri sendiri

ABSTRAK

BESSE SRI RATIH. **Relasi Partai Politik dan Pesantren di Kabupaten Wajo.**
(dibimbing oleh Muhammad Alhamid dan Andi Naharuddin).

Latar Belakang. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bagaimana Partai Politik tengah menggunakan berbagai metode dan strategi dalam memobilisasi suara untuk mendapatkan suara, termasuk diantaranya *issue* mengenai relasi partai politik dan pondok pesantren. **Tujuan Penelitian.** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi Relasi Partai Politik dan Pesantren di Kabupaten Wajo. **Metode Penelitian.** Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Landasan Teori yang digunakan adalah perspektif institusionalisme yang dikaitkan dengan dan Konsep Demokrasi, Tata Kelola Pemilu dan Konsep Peran. **Hasil Penelitian.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren As'adiyah dan kader PAN memiliki hubungan erat karena banyak alumni pesantren yang menjadi kader PAN. Banyak kader PAN menjabat posisi penting di Parlemen Wajo dan bahkan jabatan Ketua DPP PAN merupakan alumni Pondok Pesantren Asadiyah, sehingga secara tidak langsung akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan alumni dan santri Asadiyah yang tergabung dalam PAN. PAN menggunakan strategi politik dengan memperkenalkan santri kepada aktor sesuai ajaran agama dan keadaan di Wajo. Melalui kegiatan keagamaan, PAN menjaga hubungan dengan pesantren, kadang dengan dukungan finansial dan infrastruktur. Selain itu, Keberhasilan alumni santri, dan posisi aktor dengan wadah PAN yang berlabel agama sangat menguntungkan dan merupakan *extraordinary strategy* yang tidak disengaja. Melalui program keagamaan seperti Kajian Agama, Dakwah, dan khutbah jumat serta kegiatan lain seolah merupakan pola komunikasi dan *branding*-an yang kuat dan sejalan dengan Posisi PAN yang bergerak di bidang keagamaan dengan kata kunci "*branding* Aktor merupakan pendakwah, dan branding komunikasi yang bertajuk silaturahmi". Keadaan Wajo sebagai kota Santri, Posisi PAN dengan orientasi keagamaan, serta bupati terpilih berlatar belakang Muhammadiyah yang didukung kader timses PAN yang merupakan alumni santri ponpes Asadiyah, seolah menjadi strategi yang tepat untuk mengambil hati pemilih dan menggeser kursi incumbent.

Kata Kunci: Relasi, Partai Politik, Pesantren As'adiyah, Komunikasi



ABSTRACT

BESSE SRI RATIH. **Relations of Political Parties and Islamic Boarding Schools in Wajo Regency.** (Supervised by Muhammad Alhamid and Andi Naharuddin)

Background. Numerous studies have demonstrated how political parties are using various methods and strategies to mobilize votes, including the issue of the relationship between political parties and Islamic boarding schools (pesantren). **Research Objective.** This study aims to understand and identify the relationship between political parties and pesantren in Wajo Regency. **Research Method.** The type of research used is descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection was conducted through interviews and documentation. The theoretical framework used is institutionalism perspective linked with concepts of democracy, election governance, and the concept of roles. **Research Results.** The results of this study indicate that As'adiyah Islamic Boarding School and PAN (National Mandate Party) cadres have a close relationship because many alumni of the pesantren have become PAN cadres. Many PAN cadres hold important positions in the Wajo Parliament, and even the Chairman of the PAN Central Executive Board is an alumnus of Asadiyah Islamic Boarding School, making it easier to establish communication with Asadiyah alumni and students who are part of PAN. PAN uses a political strategy by introducing students to actors according to religious teachings and the situation in Wajo. Through religious activities, PAN maintains relationships with pesantren, sometimes providing financial and infrastructure support. Additionally, the success of alumni students and the position of actors with PAN, which carries a religious label, is highly beneficial and represents an extraordinary, unintended strategy. Through religious programs such as religious studies, preaching (dakwah), and Friday sermons, as well as other activities, this forms a strong communication and branding pattern that aligns with PAN's position in the religious field with the key phrase "branding the actor as a preacher, and branding communication themed on maintaining relationships." The condition of Wajo as a Santri city, PAN's position with a religious orientation, and the elected regent's background in Muhammadiyah supported by PAN's campaign team cadres who are Asadiyah pesantren alumni, seem to be an effective strategy to win the voters' hearts and shift the incumbent's position.

Keywords: *Relations, Political Parties, As'adiyah Islamic Boarding School, Communication*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENERIMAAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I, PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Teori dan Konsep.....	7
1.4.1 Relasi Politik	7
1.4.2 Strategi Politik.....	7
1.4.3 Pendekatan Institusionalisme	11
1.4.4 Konsep Partai Politik.....	14
1.4.5 Partai Amanat Nasional	16
1.4.6 Konsep Pesantren	18
1.4.7 Pesantren Asadiyah Kabupaten Wajo	20
1.4.8 Penelitian Terahulu.....	22
1.4.9 Skema Penelitian	25
BAB II, METODE PENELITIAN	26
2.1 Waktu dan Waktu.....	26
2.2 Tempat Penelitian	26
2.3 Waktu Penelitian	26
2.4 Sarana dan Alat	27



2.3 Metode Penelitian	27
2.3.1 Pendekatan Penelitian	27
2.3.2 Tipe Penelitian	28
2.3.3 Jenis Penelitian.....	28
2.3.4 Data Primer.....	28
2.3.5 Data Sekunder	28
2.4 Pelaksanaan Penelitian Data	29
2.4.1 Wawancara	29
2.4.2 Observasi.....	30
2.4.3 Dokumentasi.....	30
2.5 Pengamatan dan Pengukuran	30
BAB III, HASIL DAN PEMBAHASAN	32
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Wajo	32
3.2 Gambaran Umum Partai Amanat Nasional.....	34
3.3 Gambaran Umum Pesantren Asadiyah dan Nurul Asadiyah.....	36
3.4 Analisis Hasil dan Pembahasan Pertama: Kaitan Pesantren dengan Partai Politik	37
3.4.1 Kaitan Pondok Pesantren Asadiyah dengan Kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Wajo Sebagai Kota Santri	37
3.4.2 Kaitan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah sebagai Pembanding yang memiliki kecenderungan relasi dengan Kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Wajo Sebagai Kota Santri	41
3.5 Analisis Hasil dan Pembahasan Kedua: Hubungan antara kemenangan Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2019 dengan Kondisi Sosial Masyarakat Wajo sebagai kota santri	43
BAB IV, PENUTUP.....	46
.....	46
.....	47
.....	48
.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Jumlah Suara Partai Politik Di Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Legslatif Tahun 2019).....	27
Tabel 2 (Data Informan).....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 (Skema Penelitian).....	24
Gambar 2 (Peta Kab. Wajo)	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduknya yang multikultural dan plural, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras dan antar golongan. Berdasar atas pluralitas keislaman di Indonesia, maka dapat menjadikan setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung setiap kepentingan politik. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan partai-partai politik Islam secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh pada lahan politik yang sama. Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam kapasitas perbedaan platform ideologis atau bermakna pembelaan kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini, pragmatisme politik praktis bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding usaha pembelaan kepentingan komunitas dan agama.

Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi vote getter dalam pemilu. Kecenderungan ini di satu sisi memperluas akses politik kalangan Islam. Sedikit banyak hal ini tentu juga memberikan perluasan pengaruh Islam pada berbagai kelompok politik, sebagaimana ditandai dengan munculnya sayap Islam dalam partai nasionalis.

Di sisi lain, situasi ini juga melahirkan fragmentasi politik yang unik di kalangan umat Islam sendiri, berupa terulangnya oportunisme politik di kalangan tokoh-tokoh politik Islam sebagaimana pengalaman era 1950-an. Pergulatan politik antar tokoh Islam sendiri memperlihatkan kuatnya oportunisme di kalangan politisi



filiasi politik menjadikan mereka nyaris tidak pernah satu suara sebagai persoalan politik. (Lili Romli, 2004)

is, fungsi dasar pesantren adalah sebagai Lembaga pendidikan berbasis Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki

kedudukan yang penting dalam ranah politik, baik dalam lingkup masyarakat tradisional maupun nasional. Posisi pesantren selalu berada dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik. Sehingga, tidak sedikit pesantren yang pada akhirnya terlibat dalam arus tersebut, Hampir pada setiap kontestasi politik, pesantren dan para figur di dalamnya selalu menjadi target empuk untuk dijadikan vote getter. Bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam, tetapi juga oleh partai-partai politik nasionalis. Apalagi, sejak kontestasi Pemilu Presiden 2014 lalu, wacana politik identitas dengan simbolisasi dan atribusi bernuansa keagamaan semakin menguat.

Seiring berjalannya waktu, pesantren memang tidak lagi berpaku pengajaran nilai-nilai agama Islam secara tradisional saja. Kini, pesantren telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan dengan budaya keilmuan yang kritis, nasionalis, dan moderat. Dapat dikatakan demikian karena pada faktanya, tidak sedikit pesantren yang mampu mencetak kader-kader bangsa yang aktif dalam diskursus kenegaraan.

Muncul dan berkembangnya pendidikan Islam termasuk pesantren di Sulawesi Selatan tak terlepas dari wacana keagamaan di Haramain dan Nusantara pada abad 20. Sejarah membuktikan bahwa Pendidikan pesantren di Sulawesi Selatan secara tidak langsung dimulai sejak Islam diterima di Makassar pada 1605. Jasa besar tiga datuk dari Minangkabau sebagai utusan Kerajaan Aceh tidak bisa diabaikan. Lebih menarik lagi bahwa salah satu datuk yakni Datuk ri Bandang (Abdul Makmur Khatib Tunggal) adalah Murid Sunan Giri (w. 1530). Ulama Bugis-Makassar selanjutnya yang mengembangkan pendidikan Islam adalah Syekh Yusuf al-Makassar abad 17, Abdul Wahab al-Bugisi abad 18, serta beberapa nama seperti Abdul Basyir al-Dhahir al-Rappani (berasal dari Rappang Sidrap), Nur al-Din bin Abdul Fatah dan Abdul Qadir Karaeng Jeno. Belum ditemukan data yang memadai mengenai ulama Bugis-Makassar yang mewakili guru intelektual abad 19, kecuali bahwa resesi sosial-politik di Kerajaan Wajo pertengahan abad 19 memaksa migrasi besar-besaran orang Wajo ke beberapa wilayah di Nusantara dan Mekkah yang berkaitan dengan dibukanya Terusan Suez tahun 1861. Pandangan ini mengkonfirmasi keberadaan orang Bugis-Wajo di Mekkah abad ke 19 yang melahirkan sosok “arsitek pesantren” abad ke 20 di Sulawesi Selatan, yaitu al-Allamah Syekh Muhammad As’ad



yang lebih populer disebut “Gurutta As’ad atau Gurutta Sade.” (Syamsuddin Arief, 2007)

Secara teknis, istilah pesantren di Sulawesi Selatan secara umum baru dikenal pada tahun 1970-an sejalan dengan penggunaan gelar kyai di kalangan komunitas santri pesantren. Awalnya, penamaan madrasah atau perguruan adalah istilah untuk menyebut lembaga pendidikan Islam awal abad 20 di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, sejak awal pembentukannya pada 1930, As’adiyah sudah menggunakan istilah madrasah untuk membedakannya dari sistem pendidikan yang lain kala itu seperti Sekolah Muhammadiyah, HIS, dan Sekolah Rakyat. (Muhammad Irfan Hasanuddin, 2006)

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021 (BPS Kab. Wajo 2021). Adapun beberapa data terkait jumlah suara partai politik di kabupaten wajo dalam pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu:

No	Partai Politik	Jumlah Suarakan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2504
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2159
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1044
4.	Golongan Karya	1798
5.	Partai Berkarya	1771
6.	PKS	738
7.	Partai Persatuan Indonesia	225
8.	Nasdem	1235
9.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	410
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1300
11.	PSI	174
12.	Partai Amanat Nasional	1340
		690
		1278
		274
	lan	89



Data di atas menunjukkan partisipasi yang cukup aktif, lantas bagaimana dengan data Pemilihan Bupati Tahun 2019 di Kabupaten Wajo? Berdasarkan hasil Pemilu silam, Dr. H. Amran Mahmud mendapatkan suara sebanyak 130,035 yang merupakan kader partai PAN, sedangkan dr. H. Baso Rahmanuddin hanya mendapatkan total suara 94,340. Hal ini seolah memberikan pertanyaan, bagaimana upaya Partai PAN berhasil memenangkan suara terbanyak sebagai partai yang berideologikan keagamaan, dan memenangkan suara secara umum untuk pemilihan buoati di Kabupaten Wajo.

Keterlibatan 16 partai politik sangatlah bernilai positif, apalagi di Kabupaten Wajo ada sekitar 17 pesantren yang tersebar di seluruh 14 kecamatan se-Kabupaten Wajo. Hal ini membuat Kabupaten Wajo selain dikenal sebagai kota sutera juga dijuluki sebagai kota santri. Bagaimana tidak? Kabupaten Wajo memiliki 706 Masjid dan 106 Musala. Dari 17 Pesantren di Kabupaten Wajo, salah satunya merupakan pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Pondok Pesantren Asadiyah yang berdiri pada tahun 1930. Dari pesantren itulah lahir beberapa tokoh Islam seperti imam Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, pendiri Pesantren DDI Mangkoso, KH Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri Ponpes Yayasan perguruan Islam Beowe (Yasrib) Soppeng, KH Daud Ismail, pendiri Ponpes Nurul Azhar Talawe Sidrap, KH Fathuddin Sukkara dan masih banyak lagi.

Hal ini bisa saja membuktikan bahwa pesantren di Kabupaten Wajo memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan sampai ke pengaruh politik. Saat ini pesantren di Kabupaten Wajo telah membentuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) yang didirikan sejak tahun 2016. Forum ini dibentuk sebagai wadah silaturahmi dan kerja sama antar pesantren di Kabupaten Wajo sekaligus memperjuangkan untuk lahirnya Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo.

Relasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di tingkat daerah umumnya bertujuan untuk mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah.

Relasi politik ini disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Seperti halnya yang dikenal sebagai kota santri, hal ini menjadi tugas dari partai mana bisa mendekati diri dengan kelompok pesantren. Relasi politik misalnya juga menggunakan tokoh-tokoh pesantren untuk memenangkan suara di Kabupaten Wajo. Relasi ini tentunya dapat memberikan



keuntungan bagi pesantren dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Partai politik perlu memiliki komitmen dan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan pesantren di jalur politik.

Beberapa contoh yang bisa mengindikasikan aktivitas tertentu ialah peristiwa Bantuan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Wajo yang terus mengalir. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi dan sinergi yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan tokoh maupun wakil rakyat di pemerintah pusat. Satu di antara bantuan itu datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Bantuan dalam bentuk anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) di Kampus III Pondok Pesantren (Ponpes) Asadiyah Sengkang. Bantuan ini merupakan hasil dari fasilitasi dan aspirasi Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Aras. Bupati Wajo, Amran Mahmud, bersama beberapa tamu kehormatan mendampingi Aras meletakkan batu pertama pembangunan rusun tersebut ini di Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng. Selain itu, Amran Mahmud menjelaskan, Ponpes As'adiyah telah eksis sejak lama dan banyak melahirkan berbagai tokoh nasional maupun internasional, khususnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Asadiyah Sengkang. Selain itu, memang di antara 16 partai politik, PAN merupakan salah satu partai politik yang juga berbau religi, sehingga erat kaitannya dengan keterlibatannya yang bisa dibbilang cukup sering berkolaborasi Bersama pesantren tertua tersebut, yakni pesantren as'adiyah.

Selain itu, Sebelum masuk pada keadaan kekuasaan PAN di Kab. Wajo yang bisa dibbilang pendatang baru, Partai Golkarlah yang senantiasa menguasai kabupaten tersebut dengan Kondisi Sosial Masyarakat Wajo yang kaya akan santri, dengan rincian terdapat 69 pondok tahfidz yang di dalamnya terdapat 2.493 Hafidz dan Hafidzah membuat beberapa segmen kehidupan dipengaruhi oleh nilai-nilai santri. Sehingga, dari sini dapat terlihat indikasi adanya peralihan kekuasaan dari Golkar ke PAN dengan strategi PAN yang berupaya untuk menggeser Golkar dengan bantuan dan kondisi sosial masyarakat setempat.



H. Amran sebagai Bupati yang berasal dari partai PAN inilah yang berupaya berkegiatan politik dengan melibatkan basis pesantren. Salah satunya dengan melibatkan pesantren terbesar yaitu Ponpes As'adiyah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Relasi**

Partai Politik Dan Pesantren Di Kabupaten Wajo” untuk melihat keterkaitan atau pengaruh yang diberikan satu sama lain terhadap kekuatan tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana Pesantren berkaitan dengan Kader Partai Amanat Nasional dalam Pemenangan Pemilihan Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2019?
2. Apakah ada hubungan antara kemenangan Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2019 dengan Kondisi Sosial Masyarakat Wajo sebagai kota santri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan Kaitan Pesantren Politik Partai Amanat Nasional dalam pemenangan pemilihan Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Partai Amanat Nasional dalam menggerakkan strateginya dan berhubungan sebagai partai berbasis agama dengan kondisi sosial masyarakat wajo sebagai kota santri.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu politik serta memperkaya kajian terkait Relasi Partai Politik dan Pondok Pesantren.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik yang memiliki minat pada strategi politik dan



terkhusus para mahasiswa ilmu politik yang ingin wawasan pengetahuan masyarakat yang senantiasa terlibat politik.

1.4 Teori dan Konsep

1.4.1 Relasi Politik

Konsep relasi politik melibatkan hubungan antara individu, kelompok, atau entitas politik dalam konteks kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan politik. Teori relasi politik memperjelas dinamika di balik interaksi politik, mengungkap bagaimana aktor politik saling memengaruhi, berinteraksi, dan membentuk aliansi atau konflik.

Salah satu teori yang penting dalam konteks ini adalah teori realisme politik, yang menekankan pada persaingan kekuasaan antara negara-negara dan pemahaman bahwa negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka untuk mencapai keamanan. Selain itu, terdapat teori liberalisme yang menekankan pentingnya kerja sama internasional, pembangunan institusi global, dan norma-norma demokrasi untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama. Teori-teori ini membantu dalam memahami dinamika kompleks dalam politik global dan domestik, serta memberikan kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan, konflik, dan kerjasama politik.

Selain itu, konsep relasi politik juga mencakup dinamika dalam politik domestik, seperti hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga politik lainnya. Dalam konteks ini, teori-teori seperti pluralisme, elitis, dan teori kekuasaan membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan di dalam masyarakat dan bagaimana dinamika kekuasaan ini mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik dan implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, konsep dan teori relasi politik memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas interaksi politik dalam berbagai skala, mulai dari level global hingga lokal.



tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Ardiansyah, 2017)

Berikut ini adalah pengertian dan definisi strategi menurut para ahli:

- a. Karl Von Clausewitz berpendapat strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
- b. Halim berpendapat strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.
- c. Kaplan dan Norton berpendapat strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan *if-then*.
- d. Stephanie K. Marrus berpendapat strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
- e. Sjahfrizal berpendapat strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal.
- f. Anonim, strategi adalah keselarasan strategi dengan kebutuhan dan kemampuan dikaitkan dengan upaya penguatan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan pengelolaan (*managerialship*).



Sedangkan, Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. (Imam Hudajat, 2019) Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dilihat dari struktur dan kelembagaan, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan. Yakni, pengaturan dan penguasaan oleh negara. Cara memerintah. Organisasi, pengaturan dan tindakan negara. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan. (Kartini Kartono, 1990)

Sehingga, Menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi Politik penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. (Schorder Peter, 2000)

Dalam menyusun strategi politik suatu partai politik, hendaknya partai politik akan menentukan strategi mereka berdasarkan ideologi partai politik serta memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat. Namun dalam menentukan strategi tersebut, partai politik tidak akan mudah meraih hasil yang ingin dicapainya. Dalam merencanakan strategi politik yang telah direncanakan, partai politik akan menghadapi berbagai faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi strategi partai dalam menjalankan strategi politiknya.



Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi strategi partai politik. (Rainer Adam, 2007)

Hubungan antara teori strategi politik dan relasi partai politik dengan pesantren bisa dipahami melalui beberapa konteks dan aspek. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam membentuk opini dan memengaruhi keputusan politik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut adalah beberapa hubungan antara teori strategi politik dan relasi partai politik dengan pesantren:

- a. Pengaruh Pesantren sebagai Basis Dukungan Politik: Partai politik seringkali mencari dukungan dari pesantren karena pesantren dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunitas Muslim. Strategi politik dapat melibatkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin pesantren atau ulama yang memiliki pengaruh besar di kalangan santri.
- b. Pendekatan Kultural dan Religius: Partai politik dapat mengadopsi strategi yang menekankan nilai-nilai kultural dan religius yang dekat dengan pesantren untuk mendapatkan dukungan. Membangun citra yang islami dan konservatif dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menarik perhatian dan dukungan pesantren.
- c. Kerjasama dan Aliansi: Partai politik mungkin melakukan kerjasama atau membentuk aliansi dengan tokoh-tokoh pesantren atau kelompok Islam tertentu untuk memperkuat basis dukungannya. Aliansi ini dapat memberikan keuntungan strategis dalam bentuk pemilih yang solid atau dukungan finansial.
- d. Pengaruh Pendidikan dan Dakwah: Pesantren sering berperan dalam pendidikan dan dakwah Islam. Partai politik dapat memanfaatkan pesantren sebagai sarana untuk menyebarkan pesan politiknya. Dimana Pendidikan politik dan kampanye dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren atau kegiatan-kegiatan dakwah.



- e. Resonansi Program Politik: Partai politik yang dapat merancang program-program yang sejalan dengan nilai-nilai pesantren memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan. Serta, Strategi politik harus mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi pesantren serta memastikan bahwa program politik partai relevan dan dapat diterima di kalangan pesantren.
- f. Mengatasi Isu-isu Sensitif: Partai politik perlu memahami isu-isu yang sensitif di kalangan pesantren dan mengembangkan strategi untuk mengatasi atau meresponsnya secara bijak. Menghindari konflik dengan nilai-nilai pesantren dan mengedepankan dialog konstruktif dapat menjadi bagian dari strategi politik.

Dengan memahami dinamika ini, partai politik dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk membangun hubungan positif dengan pesantren dan memperoleh dukungan politik dari komunitas tersebut.

1.4.3 Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme merujuk pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik “pemerintahan yang baik” atau *good governance* dan negara otoriter yang berada pada titik “pemerintahan yang jelek” atau *bad governance* dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara “baik” dan “buruk” tadi.



Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Setidaknya, ada lima

karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni: (Robert, E. Godin, 1996)

1. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;
2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;
3. Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang “bersifat” individu seperti legislatif;
4. Sejarah atau *historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;
5. Analisis normatif atau *normative analysis* yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Pendekatan institusionalisme adalah sebuah kerangka teoretis yang memandang bahwa institusi-institusi dalam suatu masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku politik, kebijakan publik, dan dinamika sosial. Dalam konteks Pendekatan institusionalisme dalam ilmu politik memeriksa bagaimana institusi-institusi, seperti partai politik dan pondok pesantren, memengaruhi perilaku politik dan interaksi di dalam masyarakat. Dalam konteks relasi antara partai politik dan pondok pesantren, pendekatan institusionalisme dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana institusi-institusi ini saling memengaruhi.

Pertama, dalam hal partai politik, pendekatan institusionalisme akan memeriksa bagaimana struktur, aturan, dan partai politik memengaruhi hubungannya dengan pondok ren. Misalnya, partai politik yang memiliki kebijakan yang kung pendidikan agama atau memiliki basis dukungan di



kalangan pesantren mungkin akan memiliki hubungan yang lebih erat dengan pondok pesantren.

Kedua, dari perspektif pondok pesantren, pendekatan institusionalisme akan mengkaji bagaimana struktur dan peran pondok pesantren dalam politik lokal dan nasional. Pondok pesantren sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan agama. Pendekatan ini akan mengeksplorasi bagaimana kehadiran partai politik memengaruhi pondok pesantren, apakah melalui dukungan finansial, hubungan kelembagaan, atau interaksi politik lainnya.

Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme, para peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor institusional seperti struktur organisasi, aturan formal dan informal, dan kebijakan memengaruhi dinamika hubungan antara partai politik dan pondok pesantren. Hal ini membantu memahami bagaimana institusi-institusi ini saling memengaruhi dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks hubungan antara partai politik dan pondok pesantren, teori dan konsep Relasi Politik, Strategi Politik, serta Pendekatan Institusionalisme memiliki peran yang signifikan. Relasi Politik menyoroti interaksi dinamis antara partai politik dan pondok pesantren yang mencakup kerja sama, pengaruh, dan aliansi. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, seringkali memiliki basis massa yang besar dan berpengaruh. Partai politik memanfaatkan relasi ini untuk menggalang dukungan elektoral, sementara pondok pesantren mendapatkan keuntungan berupa dukungan politik dan kebijakan yang mendukung kepentingan mereka. Hubungan ini menciptakan simbiosis yang memungkinkan kedua pihak untuk saling memperkuat posisi dan mencapai masing-masing dalam arena politik dan sosial.

Strategi Politik menjelaskan berbagai taktik dan pendekatan digunakan partai politik untuk meraih dukungan pondok pesantren. Strategi ini dapat mencakup pendekatan personal kepada



kyai atau pimpinan pesantren, penggalangan acara bersama, serta penguatan program-program yang relevan dengan kepentingan komunitas pesantren. Selain itu, partai politik mungkin menawarkan kebijakan yang menguntungkan atau melibatkan tokoh-tokoh pesantren dalam struktur partai untuk menarik simpati dan dukungan massa pesantren. Strategi ini penting untuk memahami bagaimana partai politik berusaha menciptakan hubungan yang erat dan mendalam dengan lembaga-lembaga keagamaan demi keuntungan politik.

Pendekatan Institusionalisme menekankan pentingnya struktur dan aturan dalam hubungan antara partai politik dan pondok pesantren. Pendekatan ini memandang pondok pesantren sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai politik di masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan antara partai politik dan pondok pesantren dipengaruhi oleh kerangka institusional yang ada, seperti peraturan negara, norma agama, dan tradisi lokal. Institusi-institusi ini membentuk cara kedua aktor berinteraksi, termasuk dalam hal legitimasi, otoritas, dan pengaruh politik. Pendekatan institusionalisme membantu memahami bagaimana institusi keagamaan dan politik saling mempengaruhi dan membentuk tatanan politik yang ada. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara partai politik dan pondok pesantren, serta bagaimana hubungan ini berkontribusi pada lanskap politik dan sosial di Indonesia.

1.4.4 Konsep Partai Politik

Definisi Lapalombara dan Anderson ini membatasi partai

**** sebagai organisasi resmi, diakui pemerintah, dan ikut pemilihan

Partai politik adalah penghubung antara pusat kekuasaan

1 lokalitas (warganegara yang tersebar di aneka wilayah,

, ideologi, dan sejenisnya). Partai politik berfungsi untuk

mpatkan orang-orang (kandidat) bagi sebuah jabatan publik.



Dari definisi yang cukup bervariasi ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum. Definisi ini tentu saja terlampau sederhana akan tetapi akan dipakai di dalam tulisan ini.

Fungsi partai politik di setiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawaan: Partai politik menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Aneka penulis telah mengkaji fungsi partai politik. Salah satunya adalah David McKay. Dalam kajiannya atas partai-partai politik di Amerika Serikat, ia pun berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi:

- a. Agregasi kepentingan – fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
 - b. Memperdamaikan kelompok dalam masyarakat – fungsi ini adalah posisi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.
 - c. *Staffing government*– fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.
 - d. Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah – fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
- e. mempromosikan stabilitas politik – fungsi ini adalah fungsi partai untuk mempromosikan stabilitas politik, misalnya dengan lola isu-isu yang dibawakan kelompok ekstrim nonpartai ke parlemen untuk dicarikan titik temunya.



1.4.5 Partai Amanat Nasional

Partai politik Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, partai politik yang program formalnya berbasis Islam. Kedua, partai politik yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai Islam di atas simbol-simbol Islam. Kedua kelompok tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami ajaran Islam dan keduanya memiliki orientasi dan program yang berbeda. (Ridlo Al Hamdi, 2013)

Sejarah mencatat perjalanan Bangsa Indonesia selama ini tidak terlepas dari peran umat Islam. Ketika masa penjajahan kolonial Belanda, dengan gigihnya umat Islam Indonesia yang diwakili para ulama, kyai, santri dan rakyat berjuang dan berusaha melawan penindasan serta ketidakadilan dan mempertahankan aqidah dari para penjajah. Hal ini yang kemudian menimbulkan pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak sekali isu-isu yang menarik dalam perkembangan politik di Indonesia, salah satunya isu dalam perkembangan Islam di Indonesia di masa modern ini di mana kembali berkiprahnya Partai-Partai politik Islam dalam pemilihan umum. Sangat menarik untuk diperbincangkan.

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Partai politik ini menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. (PAN, 2023)



Alkifli Hasan, Ketua Umum PAN terpilih ingin menjadikan PAN sebagai rumah besar Indonesia dengan artian bahwa semua program yang akan dilakukan PAN ke depannya harus bertujuan

demi kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan, dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru.

Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merupakan salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, bersama dengan PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet kemudian membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah berhasil turut serta dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, Amien Rais (ketua umum Muhammadiyah saat itu) berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah. Berlainan dengan itu, Amien Rais justru merasa terpanggil melanjutkan perjuangan setelah meruntuhkan rezim Indonesia untuk kembali membangun Indonesia. Tujuannya tersebut membawanya mendirikan partai politik baru yang kemudian diberi nama Partai Amanat Nasional (PAN). Awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Pada itu puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin dan antusiasme masyarakat akan didirikannya PAN. Keputusan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Depkeh



HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orba.

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan, sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Partai ini memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.

1.4.6 Konsep Pesantren

Keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat Indonesia selama berabad-abad sampai sekarang membuktikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendidikan agama yang diberikan di sana. Apalagi kalau diingat bahwa pesantren-pesantren yang bertebaran di seluruh Indonesia sama atau hampir sama kepunyaan kyai dan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepunyaan pemerintah. (Mastuhu, 1994)

Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Pondok berarti bangunan untuk menimba ilmu. Dan perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Demikian mana asal usul kata santri yang dikutip Yasmadi dalam bukunya. Menurut Nur Cholis Madjid dapat dilihat dari dua pendapat:



Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari perkataan “sastri” sebuah kata dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nur Cholis Madjid agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas literasi bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. (Mujamil Qomar, 2021) Di sisi lain Zamarkhsari Dhofier berpendapat, kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru ini menetap.

Pengertian terminologi pesantren di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Dari sinilah barangkali Nur Cholis Madjid berpendapat sebagaimana yang dikutip Yasmadi, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya. (Yasmadi, 2005) Pada awal penjajahan Jepang, pesantren berkonfrontasi dengan imperialis baru ini, lantaran penolakan kyai Hasyim Asyari kemudian diikuti kyai-kyai pesantren lainnya terhadap saikere (penghormatan terhadap kaisar Jepang Tenno Haika sebagai keturunan dewa Amaterasu) dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pukul 07.00, sehingga mereka ditangkap dan di penjara Jepang. Ribuan kyai dan kyai berdemonstrasi mendatangi penjara, kemudian mengkitkan dunia pesantren untuk memulai gerakan bawah tanah tang Jepang (Ahmad Patoni, 2004). Pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru. Kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih



bebas, terbuka, dan demokratis. Rakyat menyambut munculnya era pendidikan baru yang belum dirasakan sebelumnya tekanan-tekanan politik penjajah. Mereka bersemangat mendorong anak-anak usia sekolah agar menempuh pendidikan. Sedang pemerintah membuka saluran-saluran Pendidikan yang pernah tersumbat ketika Belanda dan Jepang menguasai Indonesia.

1.4.7 Pesantren Asadiyah Kabupaten Wajo

Pesantren tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Pondok Pesantren Asadiyah yang berdiri pada tahun 1930. Dari pesantren itulah lahir beberapa tokoh Islam seperti imam Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, pendiri Pesantren DDI Mangkoso, KH Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri Ponpes Yayasan perguruan Islam Beowe (Yasrib) Soppeng, KH Daud Ismail, pendiri Ponpes Nurul Azhar Talawe Sidrap, KH Fathuddin Sukkara dan masih banyak lagi.

Hal ini membuktikan bahwa pesantren di Kabupaten Wajo memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan sampai ke pengaruh politik. Saat ini pesantren di Kabupaten Wajo telah membentuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) yang didirikan sejak tahun 2016. Forum ini dibentuk sebagai wadah silaturahmi dan kerja sama antar pesantren di Kabupaten Wajo sekaligus memperjuangkan untuk lahirnya Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo.

Relasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di tingkat daerah umumnya bertujuan untuk mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Relasi ini biasanya disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Seperti halnya di Kabupaten Wajo yang dikenal sebagai kota santri, hal ini menjadi tugas dari partai politik untuk bagaimana bisa mendekati diri dengan kelompok pesantren.

Bagaimana partai politik misalnya juga menggunakan tokoh-tokoh pesantren untuk mengelola partainya di Kabupaten Wajo. Relasi ini tentu saja dapat memberikan keuntungan bagi pesantren dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Partai politik perlu memiliki komitmen dan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan



pesantren di jalur politik. Sejak semula pesantren As'adiyah merupakan bagian tak terisahkan dari masyarakat. Perkembangan pesantren ini terjadi karena partisipasi masyarakat sangat baik, baik animo masyarakat dalam mengikuti pendidikan padanya maupun dalam berpartisipasi secara material. Pada satu sisi, orang-orang Sengkang yang terkenal ulet dalam berusaha telah banyak memberikan sumbangan material, namun pada sisi lain tidak ada tercatat sebagai santri yang menonjol yang pada gilirannya menjadi ulama terkenal. Ulama-ulama terkenal cetakana dari As'adiyah semuanya adalah pendatang, baik dari daerah Wajo sendiri, maupun dari luarnya.

Kegiatan dakwah melalui medya massa telah dilakukan sejak Gurutta H.As,ad dengan penerbitan medya cetak berupa majalah Al Mauizah Al Hasanah, meskipun tempo penerbitannya sangat terbatas. Pembentukan jaringan dakwah dengan medya cetak ini dilanjutkan sekitar tahun 1965 dengan penerbitan majalah Risalah As'adiyah yang penerbitannya cukup lama, mencapai puluhan tahun, namun juga berhenti. Jaringan dakwah melalui medya cetak dapat berlaku pada waktu yang lama dan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Penerbitan buku-buku buah karya para ulama As'adiyah melengkapi jaringan medya cetak ini. Buku dan majalah membangun jaringan dengan pembacanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan yang terdapat didalamnya. sehingga merupakan juga medya pendidikan.

P.P. As'adiyah senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah, khususnya di Kabupten Wajo. Keterlibatannya pada berbagai program sosial dan keagamaan bersama pemerintah daerah sering terjadi, sebagai contoh keterlibatannya dalam pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Secara formal As'adiyah tidak memiliki jaringan formal dengan partai politik, seperti Golkar dan PPP; namun juga dengan organisasai keagamaan seperti NU. Namun tidak dikatakan sdama sekali tidak mempunyai jaringan. Pesantren As'adiyah termasuk pesantren tua dan tergolong pesantren induk. Tanpa alumnyanya telah berhasil mendirikan pesantren. Keterikatan



induk-anak, bukan secara formal (pusat-cabang) tetapi moral emosional, termasuk dalam hal ini sistem dan faham keagamaan. Jaringan ini sangat luas meliputi cabang-cabang yang tersebar pada berbagai daerah. Jaringan ini bukan hanya pada cabang-cabang Pesantren As'adiyah sendiri. tetapi juga cabang- cabang pesantren DDI dan pesantren-pesantren yang dibina oleh alumni As'adiyah. Jaringan ini diperkuat dengan pembentukan As'adiyah dan DDI sebagai organisasi sosial keagamaan. Jaringan pesantren As'adiyah dengan pesantren-pesantren lain maupun dengan masyarakat dan institusi lainnya banyak ditentukan oleh kyainya. Kyai yang memimpin pesantren merupakan sentral pesantren itu. Kharisma dan ketenaran kiyai pemimpin pesantren sangat relevan dengan popularitas pesantren yang dipimpinnya sehingga menarik minat masyarakat terhadapnya, terutama pada masyarakat primordial. (As'ad, M., 2018)

Saat ini, Pesantren ini *Anre Gurutta* Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren As'adiyah, pada pendidikan Ibtida'iyah 6 tahun, lulus pada 1971. PGA 4 Tahun, pada 1974 dan PGA 6 Tahun pada 1976. Saat ini, beliau dipercayakan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Rektor Institut PTIQ Jakarta. Sebelumnya, Anregurutta Prof Nasar menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2011- 2014). Selain itu, AG. Prof Nasar juga termasuk anggota Tim Penasihat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair. (Assadiyah Pusat, 2022)

1.4.8 Penelitian Terahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu dalam memosisikan penelitian serta menunjukkan literas dari penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang an dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.



1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Rijal, Fikri, (2019). Relasi Partai Politik Dengan Pesantren (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar) berupa Skripsi Universitas Siliwangi yang menghasilkan penelitian bahwa Relasi Politik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan pondok pesantren Miftahul Huda AlAzhar Citangkolo dapat diketahui dengan tiga pola yaitu pertama, Pola Komunikasi Politik terjadi dengan adanya dialog antar pengurus, kunjungan silaturahmi dari PKB, dan pelaksanaan masa Reses di Pondok Pesantren oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, Sosialisasi Politik yang terjadi dengan dilaksanakannya seminar, maupun konsolidasi yang dilakukan pihak Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi landasan pemikiran pimpinan pesantren untuk memberikan pendidikan politik terhadap santrinya. Ketiga, Rekrutmen Politik yang terjadi dapat diketahui dari Gungun gunawan yang terpilih sebagai DPRD kota Banjar dari PKB yang merupakan lulusan sekaligus pengurus Pondok Pesantren, selain dari itu dapat diketahui dengan banyaknya pengurus maupun Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar sebagai kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Wisnu (2018) UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul Relasi Kuasa Antara Kiai Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Ogan Ilir Sumatera Selatan dimana hasil penelitiannya banyak berfokus relasi kuasa antara kiai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS Ogan ilir dilakukan karena adanya persamaan pandangan, diantaranya: faktor sosiologi, faktor Kekeluargaan, dan faktor Kekerabatan. kemudian untuk relasi yang dilakukan antara keduanya ini yaitu memberikan arahan tentang pandangan politik baik kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Ogan Ilir, baik itu dalam bentuk kampanye maupun dalam bentuk dakwah sosial



masyarakat. Dalam bentuk kampanye, kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum melakukan kampanye untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat ogan ilir dalam memilih partainya yaitu PKS.

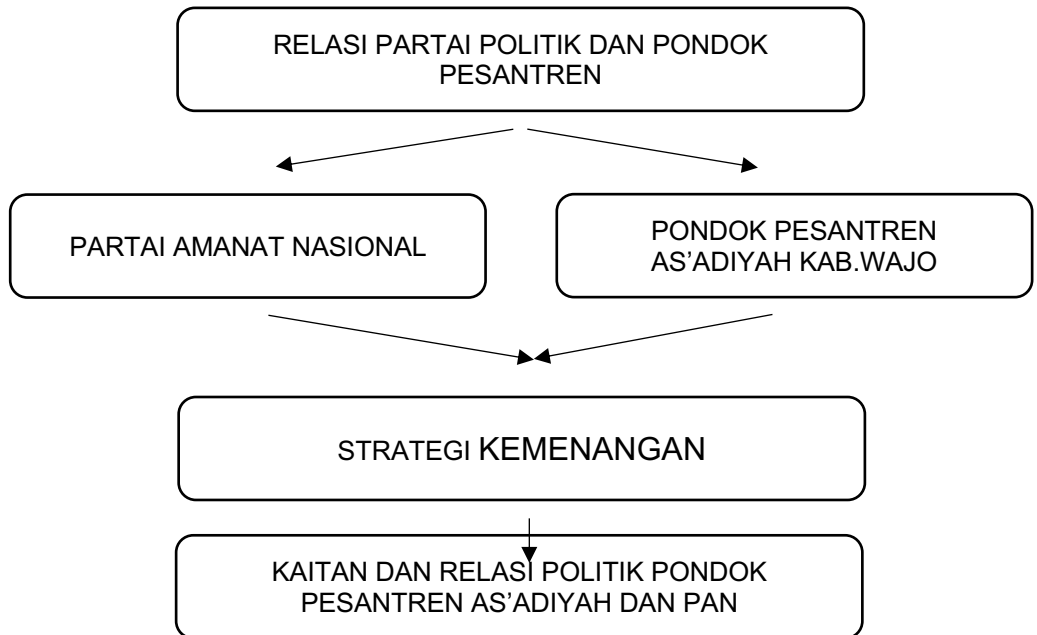
3. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Nugroho (2017) Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul Pergulatan Politik Pesantren Era Reformasi (Studi Interaksi Pesantren Dengan Partai Politik Di Kab. Banyumas) dimana fokus kajiannya dikaitkan pada Fokus penelitian ini mengkaji peran politik pesantren pada masa reformasi; bentuk manuver politik partai politik serta respon pesantren saat ini, serta latar belakang pemikiran dan alasan yang dikemukakan pesantren. Khusus yang akan dianalisis adalah hubungan pesantren dengan kepentingan ekonomi dan politik pada konfigurasi politik era reformasi multi partai. Bagi para pemimpin pesantren (kiai) di Banyumas, politik memang merupakan sebuah keniscayaan yang dapat dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun sebagian besar pimpinan pesantren (kiai) di Banyumas menunjukkan sikap terbuka terhadap partai politik, khususnya partai politik yang berbasis Islam, namun dalam pilihan konkritnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor budaya (ideologis) dan struktural (organisasi). Kedua, bagi partai politik, posisi kiai sangat penting untuk memberikan legitimasi politik dan budaya kepada konstituennya.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan kelima penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya rata-rata mengkaji ikasi politik dan kesamaan persepsi yang harus dibanung partai politik dengan pesantren. Pun dalam salah satu ian mengangkat variable yang sama, namun pada penelitian ini ; menganalisis bagaimana Partai politik dan pesantren saling



membangun relasi sebagai Lembaga yang sifatnya politis dan agama dalam melihat munculnya pengaruh elit politik, dan peranan Lembaga tertentu yang melibatkan actor (neo institusional).

1.4.9 Skema Penelitian



Gambar 1, Skema Penelitian

